

**LAPORAN KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH (LKIP)
TAHUN 2019**



**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KOTA BANDUNG**



KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung ini menginformasikan secara rinci upaya-upaya yang telah dilakukan dalam rangka pencapaian program dan kegiatan yang telah ditetapkan berdasarkan pada sumber daya keuangan, manusia dan sarana prasarana yang dimiliki secara transparan dengan harapan semoga laporan ini dapat memenuhi kebutuhan informasi berbagai pihak yang berkepentingan

Dalam rangka mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung, maka perlu untuk dilaporkan hasil kinerja pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung, hal tersebut didasari oleh Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja yang disajikan menggambarkan hasil kinerja dari tugas pokok dan fungsi yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung selama satu tahun sebagai upaya terselenggaranya pemerintah yang baik, akuntabel, transparan dan responsive terhadap aspirasi masyarakat dan dapat dikontrol oleh semua pihak.

LKIP ini disusun dengan menggunakan data realisasi kinerja yang ada pada Sekretariat dan Bidang-bidang di Lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung. Materi LKIP mengandung analisis pencapaian sasaran serta pengukuran atas kegiatan, program dan sasaran yang ditetapkan dalam Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung. LKIP juga memuat informasi mengenai keberhasilan/kegagalan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung dalam pencapaian tujuan dan sasaran, dan dapat digunakan untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerjanya pada masa mendatang.

Selanjutnya diharapkan LKIP Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung tahun 2019 ini dapat dijadikan media untuk membangun kebersamaan berdasarkan kesadaran dan komitmen bersama yang dilandasi sikap kekeluargaan, kejujuran, dan ketulusan untuk berbuat yang terbaik bagi pembangunan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung selanjutnya.

Disadari bahwa dalam penyusunan laporan kinerja instansi pemerintah ini belumlah sempurna, hal ini antara lain disebabkan kemampuan dan pemahaman yang mungkin masih berbeda dan memerlukan penambahan wawasan yang lebih komprehensif, untuk itu kami



Satuan Polisi Pamong Praja

membuka diri menerima saran dan masukan dari semua pihak sebagai bahan bagi kami untuk melakukan penyempurnaan dimasa yang akan datang.

Bandung, Januari 2020
KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KOTA BANDUNG



RASDIAN SETIADI, S.IP
Pembina Utama Muda
NIP. 19690920 201401 1 001



Daftar isi

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A Latar Belakang	1
B Gambaran Umum Satuan Polisi Pamong Praja	2
C Tugas dan Fungsi	3
D Isu Strategis	5
E Landasan Hukum	5
F Sistematika	6
BAB II PERENCANAAN KINERJA	7
A Rencana Strategis	7
B Indikator Kinerja Utama	9
C Perjanjian Kinerja Tahun 2019	12
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	21
A Kerangka Pengukuran Kinerja	19
B Capaian Indikator Kinerja Utama	21
C Realisasi Anggaran Tahun 2019	45
BAB IV PENUTUP	44



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Satuan Polisi Pamong Praja selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Dinas sebagai sub sistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan pembangunan daerah Kota Bandung, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintahan Kota, Propinsi dan Nasional.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan



bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka di terbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sehubungan dengan hal tersebut Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP). Penyusunan LKIP Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung Tahun 2019 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

B. Gambaran Umum Satuan Polisi Pamong Praja

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 255 ayat (1) menyebutkan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat. Sedangkan dalam Pasal 38 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah menyatakan bahwa Dinas Daerah yang menyelenggarakan sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum adalah Satuan Polisi Pamong Praja.

Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung kemudian menegaskan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja adalah Dinas tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum.

Adapun wewenang Satuan Polisi Pamong Praja menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 255 ayat (2) adalah sebagai berikut:

1. Melakukan tindakan penertiban non-yustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau peraturan kepala daerah;



2. Menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
3. Melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Kepala Daerah;
4. Melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Kepala Daerah.

C. Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung mempunyai tugas dan kewajiban :

Membantu Walikota dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah bidang ketenteraman dan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum

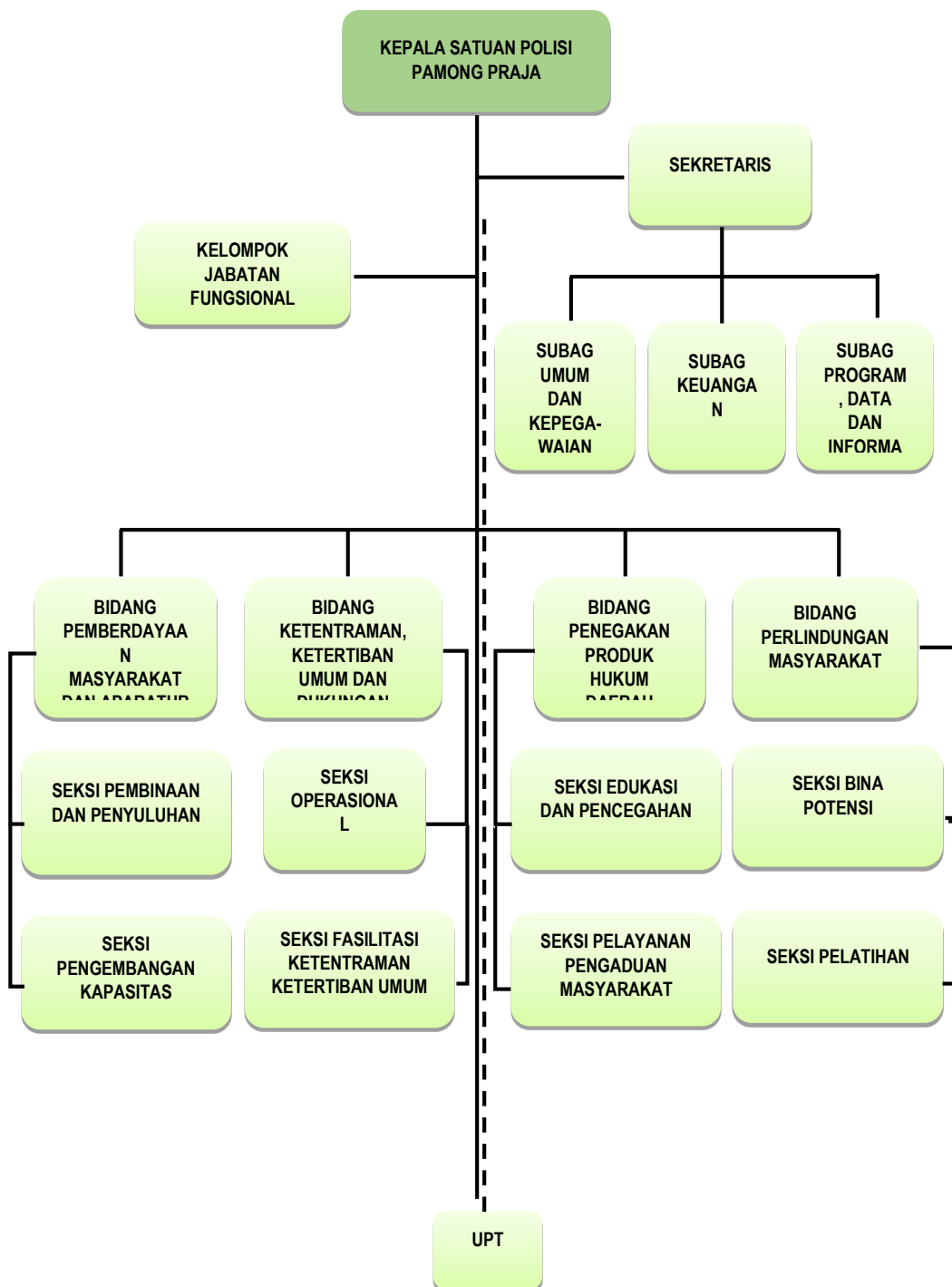
Dalam menyelenggarakan tugas dan kewajiban tersebut Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan pelaksanaan Penegakan Perda dan/atau Perkada, Penyelenggaraan Ketertiban umum dan Ketenteraman Masyarakat, serta Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat.
2. Pelaksanaan kebijakan Penegakan Perda dan/atau Perkada, Penyelenggaraan Ketertiban umum dan Ketenteraman Masyarakat, serta Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat di Daerah.
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan koordinasi Pelaksanaan penegakkan Perda dan/atau Perkada, penyelenggaraan Ketertiban umum dan Ketenteraman Masyarakat, serta penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat dengan aparat Kepolisian Negara, PPNS dan/atau aparatur lainnya.
4. Pelaksanaan administrasi lingkup Satpol PP.



5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban Dinas dipimpin oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja yang dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh pejabat struktural sebagaimana terdapat dalam struktur organisasi dibawah ini:





D. Isu Strategis

1. Masih banyak pelanggaran Perda dan Perwal yang mengandung sanksi.
2. Menjamurnya Ruang Publik.
3. Besarnya Jumlah Aktivitas dan daya tarik kota.
4. Tidak Ibangnya rasio penduduk Kota Bandung dengan jumlah Anggota Satpol PP.
5. Kesadaran warga akan keamanan dan kenyamanan lingkungan.
6. Masih kurangnya pengetahuan masyarakat tentang Perda dan Perwal yang mengandung sanksi.
7. Respon atas pengaduan masyarakat.
8. Belum adanya bantuan hukum bagi Anggota Satpol PP.
9. Masih kurangnya sarana dan prasarana khususnya kendaraan patroli.

E. Landasan Hukum

LKIP Kota Bandung ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian



Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

7. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung Tahun 2013 - 2018.

F. Sistematika

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Bandung Kota Bandung Tahun 2019 adalah :

BAB I PENDAHULUAN

Meliputi Gambaran Umum, Tugas dan Fungsi, Isu Strategis yang dihadapi SKPD, Dasar Hukum dan Sistematika.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Meliputi Perencanaan Strategis sebelum dan setelah reviu.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Meliputi Capaian IKU, Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja serta Akuntabilitas Keuangan.

BAB IV PENUTUP



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Pada penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2019 ini, mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

A. Rencana Strategis

Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung adalah merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistimatis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Daerah yang bersangkutan, dalam hal ini Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung. Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu dari tahun 2019 sampai dengan Tahun 2023. Penetapan jangka waktu 5 tahun tersebut dihubungkan dengan pola pertanggung jawaban Walikota Bandung terkait dengan penetapan / kebijakan bahwa Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung dibuat pada masa jabatannya, dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah daerah akan menjadi akuntabel.

Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung tersebut ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung Tahun 2019-2023.

Penyusunan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung telah melalui tahapan - tahapan yang simultan dengan proses penyusunan RPJMD Kota Bandung Tahun 2019-2023 dengan melibatkan stakeholders pada saat dilaksanakannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang)



RPJMD, Forum SKPD, sehingga Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung merupakan hasil kesepakatan bersama antara Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung dan stakeholder.

Selanjutnya, Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung tersebut akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Didalam Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.

1. Visi

Visi adalah gambaran kondisi ideal yang diinginkan pada masa mendatang oleh pimpinan dan seluruh staf Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung. Visi tersebut mengandung makna bahwa Kota Bandung dengan potensi, keragaman dan kompleksitas masalah yang tinggi, harus mampu dibangun menuju Kota Bandung yang Bermartabat serta Unggul, Nyaman dan Sejahtera

Visi Kota Bandung yang diemban oleh Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2019-2023 adalah :

“Terwujudnya Kota Bandung yang Unggul, Nyaman, Sejahtera, dan Agamis”

2. Misi

Sedangkan untuk mewujudkan Visi Kota Bandung Tahun 2019-2023 tersebut diatas dilaksanakan Misi sebagai berikut :

- a. Misi 2: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Melayani

3. Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu



kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategis.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Istansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu / tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai Visi dan Misi Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2019-2023 sebanyak 1 (satu) sasaran strategis.

Sebagaimana visi dan misi yang telah ditetapkan, untuk keberhasilan tersebut perlu ditetapkan tujuan, sasaran berikut indikator dan target Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung sebagai berikut :

Tabel 2.1

Tujuan/Indikator Tujuan, Target Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran Dan Target Sasaran Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung

NO	TUJUAN / INDIKATOR TUJUAN	TARGET TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET SASARAN PADA TAHUN				
					2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Meningkatkan Ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat	100%	Meningkatnya ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat	Persentase Penegakkan Perda	100	100	100	100	100
	Persentase Penegakan Perda			66,91	70,07	73,23	76,38	79,54	
	Indeks kepuasan masyarakat (IKM)			79,57	79,68	79,77	79,87	79,93	

B. Indikator Kinerja Utama

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara



Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Pemerintah Kota Bandung telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk tingkat Pemerintah Daerah dan masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah melalui Keputusan Walikota Bandung Nomor : 060/Kep.497-Orpad/2019 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Kota Bandung dan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung tahun 2019-2023.

Adapun penetapan Indikator Kinerja Utama Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung tahun 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2
Indikator Kinerja Utama
Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung Tahun 2019

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN		
				ALASAN	FORMULASI / RUMUS PERITUNGAN	SUMBER DATA
1	Meningkatnya ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat	Persentase Penegakkan Perda	%	1. Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 255 ayat (1) bahwa Satpol PP dibentuk untuk menegakkan perda dan perkara, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman, serta perlindungan masyarakat.2. Amanat Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja Pasal 1 ayat (1) bahwa Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya	$\frac{\text{Jumlah penyelesaian pelanggaran Perda}}{\text{Jumlah pelanggaran Perda yang dilaporkan}} \times 100\%$	Penyelesaian pelanggaran Perda dilakukan melalui 8 (delapan) cara yaitu sidang tipiring, biaya paksa, sanksi administratif, penurunan/penyelesaian/sticker peringatan, barang bukti disita di gudang, penyerahan pelanggar ke Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan (Dinsosnangkis), serta pembongkaran



				<p>disebut Satpol PP adalah perangkat daerah yang dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.3. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 menyebutkan bahwa Indikator Kinerja Kunci Urusan Penyelenggaraan Pemerintahan untuk Satpol PP adalah Persentase Penegakkan Perda</p>		
		Persentase Siskamling Tingkat RW yang Aktif	%	<p>1. Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 255 ayat (1) bahwa Satpol PP dibentuk untuk menegakkan perda dan perkara, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman, serta perlindungan masyarakat.2. Amanat Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja Pasal 1 ayat (1) bahwa Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah perangkat</p>	$\frac{\text{Jumlah siskamling tingkat RW yang Aktif}}{\text{Jumlah RW}} \times 100\%$	<p>Kriteria siskamling aktif adalah memiliki kepemimpinan/kelembagaan, jadwal piket/ronda, daftar hadir, dan buku laporan kejadian</p>



				daerah yang dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat. Salah satu penyelenggaraan trantibum dan perlindungan masyarakat ini dilakukan melalui siskamling aktif tingkat RW.		
		Indeks kepuasan masyarakat (IKM)	Nilai	Amanat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik melalui Survei Kepuasan Masyarakat secara berkala minimal 1 (satu) kali setahun. Survei ini dilakukan untuk memperoleh Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai Indeks X Nilai Dasar (Hasil survey oleh pihak ke-3)	Pengukuran IKM ini dilakukan melalui hasil survey 9 kriteria SKM baik dilakukan oleh pihak internal maupun oleh lembaga lain

C. Perjanjian Kinerja Tahun 2019

Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencanaan kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari



sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan Perjanjian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung Tahun 2019 mengacu pada dokumen Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung Tahun 2019-2023, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2019, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2019, dan dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2019, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2019 dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung
Tahun 2019

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat	Persentase Penegakkan Perda	100
		Persentase Siskamling Tingkat RW yang Aktif	66.91
		Indeks kepuasan masyarakat (IKM)	79.57

Indikator Kinerja Utama Hasil Reviu

Bersamaan dengan reviu rencana strategis juga dilakukan reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Satuan Polisi Pamong Praja serta menghasilkan penjelasan tentang Indikator berupa formulasi pengukuran dan kriteria indikator kinerja agar berorientasi hasil.

Berikut ini Indikator Kinerja Utama Satuan Polisi Pamong Praja hasil reviu berikut penjelasannya yang diuraikan pada table berikut :



Tabel 2.5
Indikator Kinerja Utama, Formulasi Pengukuran dan Kriteria Indikator Kinerja Hasil Reviu
Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung Tahun 2019

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	ALASAN	FORMULASI/CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA	KETERANGAN/KRITERIA
1	Meningkatnya ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat	Persentase Penegakkan Perda	%	1. Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 255 ayat (1) bahwa Satpol PP dibentuk untuk menegakkan perda dan perkara, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman, serta perlindungan masyarakat. 2. Amanat Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja Pasal 1 ayat (1) bahwa Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah perangkat daerah yang dibentuk untuk menegakkan	Jumlah penyelesaian pelanggaran Perda $\times 100\%$ $\frac{\text{Jumlah pelanggaran Perda yang dilaporkan}}{\text{Jumlah pelanggaran Perda yang dilaporkan}}$		Penyelesaian pelanggaran Perda dilakukan melalui 8 (delapan) cara yaitu sidang tipiring, biaya paksa, sanksi administratif, penurunan/penyelegalan/sticker peringatan, barang bukti disita di gudang, penyerahan pelanggar ke Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan (Dinsosnangkis), serta pembongkaran



Satuan Polisi Pamong Praja

				Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat. 3. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 menyebutkan bahwa Indikator Kinerja Kunci Urusan Penyelenggaraan Pemerintahan untuk Satpol PP adalah Persentase Penegakkan Perda			
		Persentase Siskamling Tingkat RW yang Aktif	%	1. Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 255 ayat (1) bahwa Satpol PP dibentuk untuk menegakkan perda dan perkara, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman, serta perlindungan masyarakat. 2. Amanat Peraturan Pemerintah Nomor 16	$\frac{\text{Jumlah siskamling tingkat RW yang Aktif}}{\text{Jumlah RW}} \times 100\%$		Kriteria siskamling aktif adalah memiliki kepengurusan/kelembagaan, jadwal piket/ronda, daftar hadir, dan buku laporan kejadian



Satuan Polisi Pamong Praja

				<p>Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja Pasal 1 ayat (1) bahwa Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah perangkat daerah yang dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat. Salah satu penyelenggaraan trantibum dan perlindungan masyarakat ini dilakukan melalui siskamling aktif tingkat RW.</p>			
		Indeks kepuasan masyarakat (IKM)	Nilai	Amanat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan	Nilai Indeks X Nilai Dasar (Hasil survey oleh pihak ke-3)		Pengukuran IKM ini dilakukan melalui hasil survey 9 kriteria SKM baik dilakukan oleh pihak internal maupun oleh lembaga lain



Satuan Polisi Pamong Praja

				Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik melalui Survei Kepuasan Masyarakat secara berkala minimal 1 (satu) kali setahun. Survei ini dilakukan untuk memperoleh Indeks Kepuasan Masyarakat			
--	--	--	--	--	--	--	--



Perjanjian Kinerja Hasil Reviu

Sesuai dengan tujuan dan sasaran jangka menengah Satuan Polisi Pamong Praja hasil reviu dan sebagai bahan yang diperjanjikan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung dengan Walikota Bandung dan besaran anggaran yang direncanakan melalui Program / Kegiatan pada Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.6
Perjanjian Kinerja Hasil Reviu
Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung Tahun 2019

NO	SASARAN STRATEGIS	IKU / INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	Meningkatnya ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat	Persentase Penegakkan Perda	%	100
		Persentase Siskamling Tingkat RW yang Aktif	%	66.91
		Indeks kepuasan masyarakat (IKM)	Nilai	79.57



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2019-2023 maupun Rencana Kerja Tahun 2019 Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan Visi dan Misi Satuan Polisi Pamong Praja.

A. Kerangka Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU)



diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, sebagai berikut :

Persentase	Predikat	Kode Warna
< 100%	Tidak Tercapai	Merah
= 100%	Tercapai/ Sesuai Target	Hijau
> 100%	Melebihi Target	Biru

Dan predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja yang tidak tercapai (< 100%) dengan pendekatan Permendagri nomor 54 Tahun 2010, sebagai berikut :

**Pencapaian Kinerja Sasaran Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung
Tahun 2019**

No	Kategori/Interpretasi	Rata-Rata % Capaian	Kode Warna
1	Sangat Baik	> 90	Biru Tua
2	Baik	75.00 – 89.99	Hijau
3	Cukup	65.00 – 74.99	Jingga
4	Kurang	50.00 – 64.99	Kuning
5	Sangat Kurang	0 – 49.99	Merah



Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Dalam laporan ini, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2019-2023 maupun Rencana Kerja Tahun 2019. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2019, hasil reviu dan Indikator Kinerja Utama Satuan Polisi Pamong Praja berdasarkan Keputusan Walikota Bandung Nomor : 060/Kep.497-Orpad/2019 telah ditetapkan sebanyak 1 sasaran dan sebanyak 3 indikator kinerja (out comes) dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.1
Indikator Kinerja Utama
Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung Tahun 2019

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat	Persentase Penegakkan Perda	100
		Persentase Siskamling Tingkat RW yang Aktif	66,91
		Indeks kepuasan masyarakat (IKM)	79,57

B. Capaian Indikator Kinerja Utama

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU adalah merupakan



ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah Nomor 800/277-Satpol.PP tanggal Januari 2019 dan melalui Keputusan Walikota Bandung Nomor : 060/Kep.497-Orpad/2019 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Kota Bandung dan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung tahun 2019-2023. Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung juga melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, dalam melakukan reviu dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi.

Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung tahun 2019 menunjukkan hasil sebagai berikut:

Tabel 3.2
Capaian Indikator Kinerja Utama
Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung
Tahun 2019

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %
1	Persentase Penegakkan Perda	%	100	100	100.00
2	Persentase Siskamling Tingkat RW yang Aktif	%	66.91	67.04	100.19
3	Indeks kepuasan masyarakat (IKM)	Nilai	79.57	80.15	100.73

Dari tabel tersebut terlihat bahwa tingkat pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai berikut :

Capaian kinerja yang lebih/melampaui target ditunjukkan pada indikator Persentase Siskamling Tingkat RW yang Aktif, dengan capaian kinerja 100.19 %, pada indikator Indeks kepuasan masyarakat (IKM), dengan capaian kinerja 100.73 %. Capaian kinerja yang sesuai target atau mencapai 100% ditunjukkan pada indikator Persentase Penegakkan Perda, dengan capaian kinerja 100 %.



Secara umum Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra 2019-2023. Jumlah Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai visi dan misi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung Tahun 2019-2023 sebanyak 1 sasaran.

Tahun 2019 adalah tahun ke 1 pelaksanaan Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja, 1 (satu) sasaran strategis dengan sebanyak 3 (tiga) indikator kinerja yang ditetapkan maka pencapaian kinerja sasaran Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung adalah sebagai berikut:

Tabel 3.3
Capaian Indikator Kinerja
Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung Tahun 2019

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %
1	Persentase Penegakkan Perda	%	100	100	100.00
2	Persentase Siskamling Tingkat RW yang Aktif	%	66.91	67.04	100.19
3	Indeks kepuasan masyarakat (IKM)	Nilai	79.57	80.15	100.73

Berdasarkan pengukuran kinerja tersebut di atas dapat diperoleh data dan informasi kinerja Dinas pada beberapa table berikut :

Tabel 3.4
Pencapaian Kinerja Sasaran
Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung Tahun 2019

NO	SASARAN STRATEGIS	CAPAIAN
1	Melebihi/Melampaui Target	66.67 %
2	Sesuai Target	33.33 %
3	Tidak Mencapai Target	0.00 %

Dari sebanyak 1 Sasaran diatas, pencapaian realisasi indikator kinerja sasaran terhadap target yang sudah ditetapkan sebagai berikut:

Tabel 3.5
Pencapaian target Misi

No	Misi	Jumlah Indikator Sasaran	Tingkat Pencapaian					
			Melampaui target		Sesuai Target		Belum Mencapai Target	
			Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
1	Misi 1	3	2	66.67	1	33.33	0	0.00
	Jumlah	3	2	66.67	1	33.33	0	0.00

Dari sebanyak 1 sasaran dengan sebanyak 3 indikator kinerja, pencapaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.6
Kategori Pencapaian Indikator Sasaran

No	Kategori	Jumlah Indikator	Persentase
A.	Misi 1	3	
1	Melebihi/Melampaui Target	2	66.67 %
2	Sesuai Target	1	33.33 %
3	Tidak Mencapai Target	0	0.00 %

Dari tabel di atas dapat kita lihat bahwa dari 3 (tiga) Indikator Kinerja sasaran strategis, 2 (dua) indikator kinerja tercapai di atas 100% atau dapat dipredikatkan dengan kategori **melebihi target** dan 1 (satu) sasaran tercapai 100% atau masuk ke dalam kategori **mencapai target**.

Selanjutnya pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja yang telah dicapai pada tahun 2019 dan membandingkan antara target dan realisasi pada indikator sasaran dari sebanyak 1 sasaran dan sebanyak 3 indikator kinerja dari sebanyak 1 Misi, sebagaimana telah ditetapkan dalam Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung tahun 2019-2023, analisis pencapaian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan secara rinci dapat dilihat sebagai berikut :



2. Kinerja nyata dengan target realisasi yang direncanakan.

Pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja yang telah dicapai pada tahun 2019 dan membandingkan antara target dan realisasi pada indikator sasaran dari sebanyak 1 sasaran dan sebanyak 3 indikator kinerja dari sebanyak 1 Misi, sebagaimana telah ditetapkan dalam Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung tahun 2019-2023, analisis pencapaian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan secara rinci dapat dilihat sebagai berikut :

Sasaran 1
Meningkatnya ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat

Pencapaian sasaran 1 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 3.7

Analisis Pencapaian Sasaran 1 Meningkatnya ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat

No	Indikator Kinerja	Satuan	%	Tahun 2019		%
				Target	Realisasi	
1	Persentase Penegakkan Perda	%	0.00	100	100	100.00
2	Persentase Siskamling Tingkat RW yang Aktif	%	0.00	66.91	67.04	100.19
3	Indeks kepuasan masyarakat (IKM)	Nilai	0.00	79.57	80.15	100.73

Sasaran Meningkatnya ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat dapat dilihat dari sebanyak 3 indikator yaitu :

A. Persentase Penegakan Perda

Capaian kinerja nyata indikator 1 "Persentase Penegakkan Perda " adalah sebesar 100 dari target sebesar 100 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2019 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 100.00 %, capaian ini sesuai target yang diperjanjikan. Sepanjang tahun 2019 terdapat 695 kali pelanggaran



Perda / Perwal yang terlaporkan. Formulasi pengukuran capaian indikator kinerja ini adalah sebagai berikut:

$$\frac{\sum \text{Penyelesaian pelanggaran Perda Perwal}}{\text{Pelanggaran Perda Perwal yang terlaporkan}} \times 100\%$$

$$\frac{\sum 695}{695} \times 100\% = 100\%$$

Satpol PP Kota Bandung, melalui Bidang Ketentraman Ketertiban Umum dan Dukungan Logistik (Trantibum Duklog) serta Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah (PPHD), mencatat pelanggaran Perda Perwal yang terlaporkan pada tahun 2018 sebanyak **695 pelanggaran**, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.8
Rekap Kegiatan Penertiban Tahun 2019

NO	Jenis Penertiban	Jumlah Pelanggar	Tindakan	Keterangan
1	PKL	404	Pengamanan barang bukti, pembebanan biaya paksa sampai dengan persidangan	
2	PMKS	223	Pengamanan PMKS untuk diserahkan kepada Dinas Sosial	
3	PSK	37	Tindakan Yustisial, diajukan ke persidangan	
4	Bangunan Liar	-	-	
5	Minol	13	Tindakan Yustisial, diajukan ke persidangan	
6	Perizinan	11	Tindakan Yustisial, diajukan ke persidangan	
7	Reklame	7	Sanksi administratif	
TOTAL		695		

Dari table diatas dapat dilihat bahwa jumlah pelanggaran terbesar adalah pelanggaran yang dilakukan oleh pedagang kaki lima (PKL) yaitu sebanyak 404 pelanggar dan pada posisi kedua ditempati oleh pelanggar PMKS sebanyak 223



pelanggar. Upaya yang dilakukan oleh Satpol PP dalam mengurangi tingkat pelanggaran perda dan perkada adalah dengan cara pemberian teguran lisan bagi pelanggar yang terindikasi baru pertama kali melanggar, pengamanan sarana berjualan bagi PKL yang berdagang di tempat yang telah ditentukan, pembebanan biaya paksa, sampai dengan tindakan yustisial terhadap pelanggaran tindak pidana ringan. Pelanggar PMKS diserahkan ke Dinas Sosial untuk dibina dan tindakan yustisial yaitu dengan diajukan ke pengadilan bagi pelanggar PSK yang terbukti menjajakan diri. Bagi pelanggar yang menjual minol tanpa izin serta pelanggar perizinan usaha dilakukan tindakan penyegelan tempat usaha dan tindakan yustisial.

B. Persentase Siskamling Tingkat RW yang Aktif

Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai misi strategis dalam membantu Kepala daerah untuk menciptakan suatu kondisi daerah yang tenteram, tertib dan teratur sehingga penyelenggaraan roda pemerintahan dapat berjalan dengan lancar dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan aman. Lingkungan yang kondusif merupakan bagian penting dari upaya pembangunan yang berkesinambungan. Salah satu Indikator Kinerja Utama Satpol PP Kota Bandung pada tahun 2019 adalah Persentase Siskamling Tingkat RW yang Aktif. Pembinaan Siskamling tingkat RW yang aktif difokuskan kepada RW-RW yang belum aktif sehingga sebagian RW yang pada tahun sebelumnya aktif menjadi tidak aktif menjadi tidak terpantau.

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung menargetkan indikator kinerja *persentase siskamling tingkat RW yang aktif* pada tahun 2019 sebesar 66,91%, terealisasi sebesar 67,04% atau tercapai 100.19% yang masuk ke dalam kategori **melebihi target**, dengan formulasi pengukuran sebagai berikut:

$$\sum \frac{\text{Siskamling RW yang aktif}}{\text{RW}} \times 100\%$$

$$\sum \frac{1062}{1.584} \times 100\% = 67,04\%$$

Siskamling RW Aktif yang dimaksud adalah yang memenuhi 4 (empat) kriteria, terdiri dari kepengurusan/kelembagaan, jadwal piket/ronda, daftar hadir, dan buku



laporan kejadian. Berikut hasil rekap data siskamling aktif tingkat RW di Wilayah Kota Bandung Tahun 2019:

Tabel 3.9
DATA SISKAMLING AKTIF KOTA BANDUNG
TAHUN 2019

NO	KECAMATAN/KELURAHAN	JUMLAH RW	SISKAMLING AKTIF (2018)	SISKAMLING AKTIF (2019)	BERTAMBAH/BERKURANG
1	2	3	3	4	5
1	KEC. SUKASARI	32	20	22	2
	KEL. ISOLA	6	2	2	
	KEL. SUKARASA	7	---	1	1
	KEL. SARIJADI	11	10	11	1
	KEL. GEGERKALONG	8	8	8	
2	KEC. SUKAJADI	49	23	25	2
	KEL. PASTEUR	13	2	2	
	KEL. CIPEDES	11	11	11	
	KEL. SUKAWARNA	7	2	3	1
	KEL. SUKAGALIH	6	6	7	1
	KEL. SUKABUNGAH	12	2	2	
3	KEC. CICENDO	56	47	49	2
	KEL. PASIRKALIKI	10	8	8	
	KEL. PAJAJARAN	10	10	11	1
	KEL. ARJUNA	8	8	8	
	KEL. HUSEIN SASTRANEGARA	12	12	12	
	KEL. PAMOYANAN	6	6	6	
	KEL. SUKARAJA	10	3	4	1
4	KEC. ANDIR	54	36	38	2
	KEL. KEBON JERUK	9	9	9	
	KEL. CIROYOM	10	1	2	1
	KEL. DUNGUSCARIANG	11	11	11	
	KEL. MALEBER	11	6	6	
	KEL. GARUDA	6	2	3	1
	KEL. CAMPAKA	7	7	7	
5	KEC. CIDADAP	29	13	15	2



Satuan Polisi Pamong Praja

	KEL. LEDENG	7	1	1	
	KEL. HEGARMAHAH	11	10	10	
	KEL. CIUMBULEUIT	11	2	4	2
6	KEC. COBLONG	75	32	34	2
	KEL. CIPAGANTI	7	7	7	
	KEL. DAGO	13	3	3	
	KEL. LEBAK GEDE	13	2	4	2
	KEL. SADANG SERANG	21	4	4	
	KEL. SEKELOA	15	15	15	
	KEL. LEBAK SILIWANGI	6	1	1	
7	KEC. BANDUNG WETAN	36	16	18	2
	KEL. CITARUM	8	8	9	1
	KEL. CIHAPIT	8	1	1	
	KEL. TAMANSARI	20	7	8	1
8	KEC. SUMUR BANDUNG	37	28	30	2
	KEL. MERDEKA	9	9	9	
	KEL. KEBON PISANG	12	10	11	1
	KEL. BRAGA	8	8	8	
	KEL. BAKAN CIAMIS	8	1	2	1
9	KEC. CIBEUNYING KIDUL	87	69	69	0
	KEL. CIKUTRA	15	12	12	
	KEL. CICALAS	15	15	15	
	KEL. SUKAMAJU	12	9	9	
	KEL. PADASUKA	16	12	12	
	KEL. SUKAPADA	16	16	16	
	KEL. PASIRLAYUNG	13	5	5	
10	KEC. CIBEUNYING KALER	46	32	34	2
	KEL. CIHAURGEULIS	12	12	12	
	KEL. SUKALUYU	11	8	8	
	KEL. NEGLASARI	8	8	9	1
	KEL. CIGADUNG	15	4	5	1
11	KEC. ASTANA ANYAR	47	25	27	2
	KEL. KARANG ANYAR	9	4	4	
	KEL. KARASAK	6	---	---	
	KEL. PANJUNAN	6	1	1	



Satuan Polisi Pamong Praja

	KEL. NYENGSERET	7	7	8	1
	KEL. CIBADAK	9	7	8	1
	KEL. PELINDUNG HEWAN	10	6	6	
12	KEC. BOJONGLOA KALER	47	27	29	2
	KEL. BABAKAN TAROGONG	7	7	7	
	KEL. JAMIKA	11	11	11	
	KEL. KOPO	12	---	1	1
	KEL. BABAKAN ASIH	7	7	7	
	KEL. SUKA ASIH	10	2	3	1
13	KEC. BABAKAN CIPARAY	57	49	51	2
	KEL. SUKAHAJI	10	10	10	
	KEL. BABAKAN	13	13	14	1
	KEL. BABAKAN CIPARAY	9	9	9	
	KEL. MARGAHAYU UTARA	11	11	12	1
	KEL. MARGASUKA	9	1	1	
	KEL. CIRANGRANG	5	5	5	
14	KEC. BOJONGLOA KIDUL	44	26	28	2
	KEL. SITUSAEUR	8	1	1	
	KEL. KEBON LEGA	11	6	7	1
	KEL. CIBADUYUT	8	8	8	
	KEL. CIBADUYUT KIDUL	6	4	4	
	KEL. MEKARWANGI	7	7	8	1
	KEL. CIBADUYUT WETAN	4	---	---	
15	KEC. BANDUNG KULON	74	49	50	1
	KEL. WARUNG MUNCANG	10	14	15	1
	KEL. CIBUNTU	10	1	1	
	KEL. CIJERAH	10	10	10	
	KEL. CARINGIN	6	4	4	
	KEL. CIGONDEWAH KALER	14	3	3	
	KEL. GEMPOLSARI	10	8	8	
	KEL. CIGONDEWAH RAHAYU	8	6	6	
	KEL. CIGONDEWAH KIDUL	6	3	3	
16	KEC. REGOL	60	50	52	2
	KEL. BALONG GEDE	7	7	8	1
	KEL. CIGERELENG	12	7	7	



Satuan Polisi Pamong Praja

	KEL. ANCOL	9	3	4	1
	KEL. CISEUREUH	8	8	8	
	KEL. CIATEUL	9	10	10	
	KEL. PASIRLUYU	9	9	9	
	KEL. PUNGKUR	6	6	6	
17	KEC. LENGKONG	65	35	36	1
	KEL. PALEDANG	8	8	8	
	KEL. BURANGRANG	9	5	5	
	KEL. LINGKAR SELATAN	10	6	6	
	KEL. TURANGGA	11	2	2	
	KEL. MALABAR	11	9	10	1
	KEL. CIKAWAO	9	5	5	
	KEL. CIJAGRA	7	---	---	
18	KEC. BATUNUNGGAL	83	72	74	2
	KEL. KACAPIRING	9	9	10	1
	KEL. KEBON WARU	8	8	8	
	KEL. MALEER	12	12	12	
	KEL. CIBANGKONG	13	13	13	
	KEL. GUMURUH	12	1	1	
	KEL. KEBON GEDANG	8	8	8	
	KEL. SAMOJA	11	11	11	
	KEL. BINONG	10	10	11	1
19	KEC. KIARACONDONG	85	78	80	2
	KEL. CICAHEUM	12	12	13	1
	KEL. BABAKAN SURABAYA	15	15	16	1
	KEL. BABAKAN SARI	18	18	18	
	KEL. KEBON JAYANTI	14	14	14	
	KEL. SUKAPURA	15	8	8	
	KEL. KEBON KANGKUNG	11	11	11	
20	KEC. ARCAMANIK	51	31	33	2
	KEL. CISARANTEN ENDAH	12	11	12	1
	KEL. CISARANTEN KULON	11	---	---	
	KEL. CIS. BINA HARAPAN	11	11	11	
	KEL. SUKAMISKIN	17	9	10	1
21	KEC. CIBIRU	53	43	45	2



Satuan Polisi Pamong Praja

	KEL. CISURUPAN	10	---	---	
	KEL. PALASARI	14	14	15	1
	KEL. CIPADUNG	17	17	17	
	KEL. PASIRBIRU	12	12	13	1
22	KEC. ANTAPANI	62	62	64	2
	KEL. ANTAPANI TENGAH	24	24	25	1
	KEL. ANTAPANI KIDUL	19	19	19	
	KEL. ANTAPANI KULON	7	7	7	
	KEL. ANTAPANI WETAN	12	12	13	1
23	KEC. UJUNG BERUNG	59	24	26	2
	KEL. CIGENDING	11	1	2	1
	KEL. PASIR WANGI	12	12	13	1
	KEL. PASIR JATI	14	6	6	
	KEL. PASANGGRAHAN	15	5	5	
	KEL. PASIR ENDAH	7	---	---	
24	KEC. RANCASARI	52	29	31	2
	KEL. MANJAHLEGA	16	8	8	
	KEL. MEKARJAYA	11	---	---	
	KEL. CIPAMOKOLAN	12	10	11	1
	KEL. DERWATI	13	11	12	1
25	KEC. BUAH BATU	55	32	34	2
	KEL. JATISARI	7	7	7	
	KEL. SEKEJATI	14	---	1	1
	KEL. MARGASARI	21	12	13	1
	KEL. CIJAWURA	13	13	13	
26	KEC. BANDUNG KIDUL	34	8	10	2
	KEL. MENGGER	5	---	1	1
	KEL. WATES	7	3	3	
	KEL. KUJANG SARI	10	2	3	1
	KEL. BATUNUNGGAL	12	3	3	
27	KEC. GEDE BAGE	41	8	10	2
	KEL. CIMINCRANG	8	4	5	1
	KEL. CISARANTEN KIDUL	15	---	1	1
	KEL. RANCABOLANG	10	4	4	
	KEL. RANCANUMPANG	8	---	---	



28	KEC. PANYILEUKAN	37	15	17	2
	KEL. MEKARMULYA	6	1	2	1
	KEL. CIPADUNG KIDUL	14	---	---	
	KEL. CIPADUNG WETAN	6	3	4	1
	KEL. CIPADUNG KULON	11	11	11	
29	KEC. CINAMBO	25	14	16	2
	KEL. SUKAMULYA	6	---	1	1
	KEL. PAKEMITAN	5	4	5	1
	KEL. CISARANTEN WETAN	6	6	6	
	KEL. BAKAKAN PENGHULU	8	4	4	
30	KEC. MANDALAJATI	52	13	15	2
	KEL. JATI HANDAP	17	1	2	1
	KEL. KARANG PAMULANG	12	4	5	1
	KEL. SINDANGJAYA	12	8	8	
	KEL. PASIR IMPUN	11	---	---	
	JUMLAH	1584	1006	1062	56

Dari tabel di atas dapat disimpulkan point-point sebagai berikut:

1. Kecamatan yang memiliki capaian tertinggi adalah Kecamatan Antapani sebesar 100% di tempat kedua dicapai oleh Kecamatan Kiaracondong sebesar 94,12%. Capaian terendah ada di Kecamatan Gedebage sebesar 24,40%.
2. Kecamatan yang capaian siskamling aktif tingkat RW di bawah 50% sebanyak 8 (delapan) kecamatan yaitu, Bandung Kidul, Panyileukan, Mandalajati, Sukajadi, Cidapad, Coblong, Bandung Wetan, dan Ujung Berung.
3. Kelurahan yang tidak memiliki siskamling aktif atau capaiannya 0% sebanyak 7 (tujuh) Kelurahan yaitu, Karasak, Cibaduyut Wetan, Cijagra, Cisaranten Kulon, Mekarjaya, Rancanumpang dan Cipadung Kidul.

Catatan untuk point ke-3 di atas adalah kelurahan-kelurahan yang tidak memiliki siskamling aktif bukan berarti tidak memiliki siskamling di tiap RW-nya, hanya saja tidak memenuhi keempat kriteria siskamling aktif yang ditetapkan oleh Satpol PP Kota Bandung.



Faktor yang menjadikan tidak aktifnya siskamling di tingkat RW salah satunya karena adanya pergantian kepengurusan sehingga belum mengetahui kriteria siskamling aktif. Satpol PP Kota Bandung, yang dimotori oleh Bidang Linmas secara terus menerus melaksanakan pembinaan sampai dengan ke tingkat kelurahan untuk dapat mengaktifkan kegiatan siskamling. Berdasarkan tabel diatas, pada tahun 2019 capaian Siskamling aktif di Kota Bandung adalah sebesar 67.04% atau sebanyak 1062 siskamling tingkat RW yang aktif dari 1584 RW yang berada di Kota Bandung, sehingga Indikator Kinerja Utama (IKU) ini dikategorikan melebihi target.

C. Indeks kepuasan masyarakat (IKM)

Sebagai pelayan publik Satpol PP Kota Bandung dituntut untuk terus meningkatkan kualitas pelayanannya. Pengukuran IKM ini dilakukan melalui hasil survey 10 kriteria SKM dilakukan oleh lembaga lain sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Untuk mencapai nilai IKM yang baik, maka hal yang dapat dilakukan adalah memperbaiki nilai kriteria pelayanan yang dianggap masyarakat masih bisa ditingkatkan. Secara umum nilai IKM Satpol PP Kota Bandung dikategorikan Baik, dengan capaian nilai IKM sebesar 80.15.

Tabel 3.10

Nilai Persepsi, Nilai Interval IKM, Nilai Interval Konversi IKM, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan

NILAI PERSEPSI	NILAI INTERVAL IKM	INILAI INTERVAL KONVERSI IKM	MUTU PELAYANAN	KINERJA UNIT PELAYANAN
1	1,00 – 2,5996	25 – 64,99	D	Tidak Baik
2	2,60 – 3,064	65,00 – 76,60	C	Kurang Baik
3	3,0644 – 3,532	76,61 – 88,30	B	Baik
4	3,5324 – 4,00	88,31 – 100,00	A	Sangat Baik

Berikut adalah nilai unsur pelayanan yang dicapai oleh Satpol PP Kota Bandung tahun 2019:



Tabel 3.11
Nilai Unsur Pelayanan

No.	NILAI UNSUR PELAYANAN	
1	Persyaratan	3,25
2	Sistem, mekanisme dan prosedur	3,13
3	Waktu penyelesaian	3,16
4	Biaya/tarif	3,53
5	Produk spesifikasi jenis layanan	3,25
6	Kompetensi pelaksana	3,14
7	Perilaku pelaksana	3,11
8	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	3,18
9	Sarana dan Prasarana	3,17

Dari tabel diatas, dapat dilihat nilai unsur pelayanan tertinggi diperoleh dari unsur biaya/tarif. Sedangkan nilai unsur terendah adalah perilaku pelaksana. Hal tersebut menjadi catatan bagi Satpol PP Kota Bandung untuk lebih meningkatkan perilaku pelaksana dalam menjalankan tugas dan fungsi nya sebagai penegak perda/perkada, menjaga ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.

3. Kinerja nyata dengan kinerja tahun-tahun sebelumnya.

Pada tahun 2019 terdapat perubahan indikator kinerja bila dibandingkan dengan tahun 2018. Pada tahun 2019 hanya terdapat 3 (tiga) indikator kinerja, sedangkan pada tahun 2018 terdapat 4 (empat) indikator seperti yang dapat kita lihat pada tabel berikut ini:



Tabel 3.12
Capaian Indikator Kinerja
Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung Tahun 2018

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %
1	Cakupan penyelesaian penegakan Perda	%	100	100	100.00
2	Persentase siskamling tingkat RW yang aktif	%	63.64	63.76	100.19
3	Cakupan penyelesaian gangguan tibum tranmas	%	100	100.93	100.93
4	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	79.25	79.29	100.05

Indikator Cakupan penyelesaian penegakan Perda dan Cakupan penyelesaian gangguan tibum tranmas tidak digunakan pada tahun 2019. Capaian indikator kinerja yang dapat dibandingkan adalah indikator Persentase siskamling tingkat RW yang aktif dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) seperti dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.13
Perbandingan Capaian Indikator Kinerja
Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung Tahun 2018 dan Tahun 2019

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2018		%	Tahun 2019		%
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	Persentase Penegakkan Perda	%	-	-	-	100	100	100.00
2	Persentase Siskamling Tingkat RW yang Aktif	%	63.64	63.76	100.19	66.91	67.04	100.19
3	Indeks kepuasan masyarakat (IKM)	Nilai	79.25	79.29	100.05	79.57	80.15	100.73

Secara umum apabila membandingkan indikator kinerja pada tahun 2019 dan tahun 2018, terjadi peningkatan pada indikator Persentase siskamling tingkat RW yang aktif dan indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Satpol PP Kota Bandung terus berusaha meningkatkan pelayanan kepada masyarakat yang salah satunya dengan membina Siskamling tingkat RW yang aktif untuk dapat menjaga ketenteraman dan ketertiban serta perlindungan masyarakat di wilayah Kota



Bandung. Dari sisi pelayanan, Indeks Kepuasan Masyarakat pun meningkat bahkan melampaui target yang telah ditetapkan pada Renja tahun 2019. Berdasarkan Permenpan RB Nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, nilai mutu pelayanan publik dapat dilihat berdasarkan tabel dibawah ini:

Tabel 3.14
Nilai Persepsi, Nilai Interval IKM, nilai Interval Konversi IKM, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan

NILAI PERSEPSI	NILAI INTERVAL IKM	INILAI INTERVAL KONVERSI IKM	MUTU PELAYANAN	KINERJA UNIT PELAYANAN
1	1,00 – 2,5996	25 – 64,99	D	Tidak Baik
2	2,60 – 3,064	65,00 – 76,60	C	Kurang Baik
3	3,0644 – 3,532	76,61 – 88,30	B	Baik
4	3,5324 – 4,00	88,31 – 100,00	A	Sangat Baik

Berikut adalah nilai unsur pelayanan yang dicapai oleh Satpol PP Kota Bandung tahun 2019:

Tabel 3.15
Nilai Unsur Pelayanan

No.	NILAI UNSUR PELAYANAN	
1	Persyaratan	3,25
2	Sistem, mekanisme dan prosedur	3,13
3	Waktu penyelesaian	3,16
4	Biaya/tarif	3,53
5	Produk spesifikasi jenis layanan	3,25
6	Kompetensi pelaksana	3,14
7	Perilaku pelaksana	3,11
8	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	3,18
9	Sarana dan Prasarana	3,17

Dari tabel diatas, dapat dilihat nilai unsur pelayanan tertinggi diperoleh dari unsur biaya/tarif. Sedangkan nilai unsur terendah adalah perilaku pelaksana. Hal



tersebut menjadi catatan bagi Satpol PP Kota Bandung untuk lebih meningkatkan perilaku pelaksana dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai penegak perda/perkada, menjaga ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.

4. Kinerja nyata dengan target akhir renstra.

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah berdasarkan Renstra Satpol PP Kota Bandung tahun 2019 – 2023, adalah sebagai berikut:

Tabel 3.16
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Satpol PP Kota Bandung

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN /SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN / SASARAN PADA TAHUN KE-				
				1	2	3	4	5
1	Meningkatkan Ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat	Meningkatnya ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat	Persentase Penegakkan Perda	100	100	100	100	100
			1. Persentase Penegakkan Perda	100	100	100	100	100
			2. Persentase Siskamling Tingkat RW yang Aktif	66,91	70,07	73,23	76,38	79,54
			3. Indeks kepuasan masyarakat (IKM)	79,57	79,68	79,77	79,87	79,93

Kinerja nyata yang dicatatkan oleh Satpol PP pada tahun 2019 berdasarkan sasaran Meningkatkan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat disajikan dalam tabel dibawah ini:

Tabel 3.17

Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2019

No	Indikator Kinerja	Satuan	%	Tahun 2019		%
				Target	Realisasi	
1	Persentase Penegakkan Perda	%	0.00	100	100	100.00
2	Persentase Siskamling Tingkat RW yang Aktif	%	0.00	66.91	67.04	100.19
3	Indeks kepuasan masyarakat (IKM)	Nilai	0.00	79.57	80.15	100.73

Berikut ini kami sajikan perbandingan realisasi kinerja yang telah dicapai pada tahun 2019 dengan target akhir Renstra 2019-2023 :

Tabel 3.18

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2019 dengan Target Akhir Renstra Satpol PP Kota Bandung

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN /SASARAN	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2019	TARGET KINERJA AKHIR RENSTRA
1	Meningkatkan Ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat	Meningkatnya ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat	Persentase Penegakkan Perda	100	100
			1. Persentase Penegakkan Perda	100	100
			2. Persentase Siskamling Tingkat RW yang Aktif	67.04	79,54
			3. Indeks kepuasan masyarakat (IKM)	80.15	79,93

Tahun 2019 adalah tahun ke 1 renstra, capaian kinerja indikator 1 "Persentase Penegakkan Perda " tahun ini adalah sebesar 100%, bila dibandingkan dengan target akhir renstra Satuan Polisi Pamong Praja maka capaian kinerjanya mencapai 100%.



Dengan kata lain, Satpol PP Kota Bandung berusaha untuk mempertahankan konsistensi capaian kinerja indikator ini sampai dengan tahun ke 5 renstra.

Capaian kinerja nyata indikator 2 "Persentase Siskamling Tingkat RW yang Aktif" adalah sebesar 67.04 dari target sebesar 66.91 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2019 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 100.19 %, capaian ini melebihi target yang diperjanjikan. Target yang diharapkan pada indikator ini adalah penambahan sebanyak 50 siskamling tingkat RW yang aktif setiap tahunnya. Bila dibandingkan dengan target akhir renstra Satuan Polisi Pamong Praja maka capaian kinerjanya mencapai 84.86 %. Untuk mencapai target sampai dengan target akhir renstra, Satpol PP melalui Bidang Linmas melaksanakan kegiatan pembinaan kepada kelurahan-kelurahan yang persentase siskamling tingkat RW nya masih rendah. Cara lain yang dilakukan adalah melalui koordinasi dan penyuluhan oleh Satpol PP yang dijadwalkan secara rutin.

Capaian kinerja nyata indikator 3 "Indeks kepuasan masyarakat (IKM)" adalah sebesar 80.15 dari target sebesar 79.57 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2019 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 100.73 %, capaian ini melebihi target yang diperjanjikan. Bila dibandingkan dengan target akhir renstra Satuan Polisi Pamong Praja maka capaian kinerjanya mencapai 100.27%, dengan kata lain telah melampaui target akhir Renstra. Langkah yang dilakukan untuk meningkatkan nilai IKM dilakukan melalui peningkatan layanan. Pada tahun 2019, nilai unsur pelayanan terendah ada pada perilaku pelaksana dengan nilai unsur pelayanan sebesar 3.11. Pada tahun 2020 Satpol PP Kota Bandung akan lebih meningkatkan nilai unsur pelayanan tersebut, sehingga masyarakat semakin memberikan respon positif atas kinerja Satpol PP Kota Bandung.

5. Perbandingan Kinerja Dengan Kinerja Instansi Lain

Tahun 2019 kami membandingkan capaian kinerja Satpol PP Kota Bandung dengan capaian kinerja Satpol PP Kota Bekasi. Perbandingan capaian kinerja ini dikarenakan kesamaan indikator kinerja keduanya. Tabel dibawah ini menunjukkan capaian indikator kinerja utama Satpol PP Kota Bandung:



Tabel 3.17
Capaian Indikator Kinerja Utama
Satpol PP Kota Bandung Tahun 2019

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2019		%
			Target	Realisasi	
1	Persentase Penegakkan Perda	%	100	100	100.00
2	Persentase Siskamling Tingkat RW yang Aktif	%	66.91	67.04	100.19
3	Indeks kepuasan masyarakat (IKM)	Nilai	79.57	80.15	100.73

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa Satpol PP Kota Bandung realisasi 2 (dua) indikator kinerja telah melampaui target, sedangkan satu indikator mencapai target. Sebagai perbandingan, berikut kami sajikan capaian indikator kinerja utama Satpol PP Kota Bekasi:

Tabel 3.18
Capaian Indikator Kinerja Utama
Satpol PP Kota Bekasi Tahun 2019

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2019		Capaian Kinerja
			Target	Realisasi	
1	Persentase penurunan jumlah pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	%	7	7,20	100.2
2	Nilai AKIP	Nilai	B	BB	
3	Indeks kepuasan masyarakat (IKM)	Nilai	B	B	Tercapai



Satpol PP Kota Bekasi memiliki satu (1) indikator yang sama dengan Satpol PP Kota Bandung yaitu indikator indeks kepuasan masyarakat (IKM). Sedangkan indikator Persentase penurunan jumlah pelanggaran ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat memiliki kesamaan dengan indikator Persentase Penegakkan Perda di Satpol PP Kota Bandung yaitu menekankan pada penegakan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah hukum masing-masing daerah.

6. Kinerja nyata dengan kinerja standar nasional

Satpol PP Kota Bandung sebagai perangkat daerah di wilayah administratif Kota, tidak dapat membandingkan kinerja nyata nya dengan kinerja instansi lain pada level nasional.

7. Analisis keberhasilan atau peningkatan kinerja

Evaluasi terhadap penyebab keberhasilan atau kegagalan bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi kinerja, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian misi, agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang. Keberhasilan Satpol PP dalam mencapai target kinerja yang telah ditetapkan dipengaruhi oleh beberapa faktor. Adapun faktor-faktor pendukung keberhasilan capaian kinerja tersebut adalah sebagai berikut:

a. Persentase Penegakan Perda

1. Adanya tim Patroli Reaksi Cepat (PRC) yang merupakan tim pertama yang merespon pelanggaran Perda yang terjadi di wilayah Kota Bandung;
2. Dibentuknya Unit Khusus yang menangani pelanggaran-pelanggaran Perda secara spesifik, yaitu Unit Khusus penertiban PKL, Unit Khusus Penertiban PMKS dan Unit Khusus Malam yang bertugas secara mobile pada malam hari;
3. Tersedianya kanal-kanal laporan pengaduan, baik secara langsung maupun elektronik. Pengaduan-pengaduan dari masyarakat yang diterima oleh admin Satpol PP direspon secara langsung untuk ditangani. Penanganan laporan yang dimaksud dapat dilakukan sendiri oleh Anggota Pol PP maupun



disampaikan kepada instansi-instansi yang menjadi leading sector atas laporan pengaduan yang disampaikan.

b. Persentase Siskamling Tingkat RW yang Aktif

Keberhasilan indikator kinerja persentase siskamling tingkat RW yang aktif adalah hasil kerja Bidang Perlindungan Masyarakat yang memiliki Seksi Pelatihan dan Seksi Bina Potensi yang secara simultan memberikan pembinaan dan pelatihan pada masyarakat di kewilayahan untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya siskamling. Seksi Bina potensi melaksanakan perlombaan siskamling tingkat wilayah untuk mendukung peningkatan persentase Siskamling tingkat RW yang aktif.

c. Indeks Kepuasan Masyarakat

Tingkat kinerja penyelenggaraan pelayanan Satpol PP Kota Bandung yang telah dilaksanakan mengalami peningkatan. Hasil survey menunjukkan bahwa harapan dan kebutuhan pelayanan yang dilakukan Satpol PP memperlihatkan pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparaturnya penyelenggara pelayanan publik dikatakan 'Baik'. Nilai unsur pelayanan tertinggi diperoleh oleh unsur biaya/tari dan diposisi kedua yaitu unsur persyaratan. Masyarakat menilai pelayanan yang diberikan oleh Satpol PP sangat mudah untuk diakses dan tidak memerlukan biaya.

8. Efisiensi Penggunaan Anggaran

Pagu anggaran untuk membiayai program dan kegiatan pada tahun 2019 adalah sebesar Rp. 29.504.861.732. Table berikut menyajikan perbandingan pagu anggaran dengan realisasi penyerapan anggaran pada tahun 2019:

Tabel 3.19
Pagu dan Realisasi Anggaran Tahun 2019

NO.	SASARAN STARTEGIS	PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	%
1	Meningkatnya ketertiban umum dan Ketenteraman Masyarakat Serta	29.504.861.732	25.400.532.943	86,09



	Perlindungan Masyarakat			
JUMLAH		29.504.861.732	25.400.532.943	86,09

Untuk mengetahui efektifitas anggaran terhadap capaian sasaran strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung, dapat diketahui dari capaian kinerja sasaran dan anggaran yang digunakan pada tahun 2019 sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.20
Tingkat Efektifitas Anggaran Tahun 2019

NO	KINERJA			ANGGARAN		
	SASARAN STRATEGIS	JUMLAH INDIKATOR	RATA-RATA % CAPAIAN KINERJA	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1	Meningkatnya ketertiban umum dan Ketenteraman Masyarakat Serta Perlindungan Masyarakat	3	100.29 %	29.504.861.732	25.400.532.943	86,09

Selain mengukur tingkat efektivitas maka diukur pula tingkat efisiensi yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.21
Tingkat Efisiensi Anggaran Tahun 2019

NO.	SASARAN STRATEGIS	RATA-RATA % CAPAIAN KINERJA	% REALISASI ANGGARAN	TINGKAT EFISIENSI (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)-(4)
1	Meningkatnya ketertiban umum dan Ketenteraman Masyarakat Serta Perlindungan Masyarakat	100.29	86,09	14,20



Pada tabel di atas dapat diketahui tingkat efisiensi anggaran sasaran strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung. Sasaran Meningkatnya ketertiban umum dan Ketenteraman Masyarakat Serta Perlindungan Masyarakat tingkat efisiensi anggaran yang diraih sebesar 14,20%

C. Realisasi Anggaran Tahun 2019

Tahun 2019 Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung menganggarkan anggaran Belanja Langsung sebesar **Rp. 29.504.861.732** (dua puluh Sembilan miliar lima ratus empat juta delapan ratus enam puluh satu ribu tujuh ratus tiga puluh dua Rupiah). Anggaran tersebut digunakan untuk melaksanakan 8 program dan 36 kegiatan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung seperti yang tersaji dalam tabel dibawah ini:

Urusan/Bidang/Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target		Realisasi	
		Kinerj a	Anggaran	Kinerja	Anggaran
1	2	3	4	5	7
Urusan Wajib Pelayanan Dasar					
Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat					
Satuan Polisi Pamong Praja			29.504.861.732,00		25.400.532.934
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan Administrasi Perkantoran	100%	3.999.288.466		3.520.977.917
Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan bulanan penyediaan jasa Komunikasi, Air Dan Listrik	12 Laporan	210.927.280,00	12 Laporan	147.931.356
Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan bulanan Penyediaan Jasa peralatan dan perlengkapan kantor	12 Laporan	167.045.720,00	12 Laporan	111.360.140



Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Laporan Bulanan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	12 Bulan	101.965.519,00	12 Bulan	62.175.500
Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah Laporan bulanan penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	12 Laporan	65.166.500,00	12 Laporan	52.758.405
Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah Unit Peralatan Kerja yang diperbaiki	223 Unit	120.754.000,00	223 Unit	114.099.300
Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Laporan Bulanan Penyediaan ATK	12 Laporan	132.888.637,00	12 Laporan	126.713.290
Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Jenis Pengadaan Cetak dan Penggandaan	14 Jenis	120.119.150,00	14 Jenis	113.108.900
Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Laporan Bulanan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	12 Laporan	14.340.260,00	12 Laporan	2.868.500
Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Laporan Bulanan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	12 Laporan	5.071.000,00	12 Laporan	5.020.290
Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Bulanan Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan	12 Laporan	63.372.000,00	12 Laporan	57.936.000
Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Laporan Bulan Penyediaan Makanan Dan Minuman	12 Laporan	617.950.000,00	12 Laporan	469.275.544



Kegiatan Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah Laporan bulanan Kegiatan Koordinasi Dan Konsultasi Keluar Daerah	12 Laporan	650.000.000,00	12 Laporan	649.967.552
Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan, Pengamanan dan Pengemudi Kendaraan Operasional Kantor	Jumlah Tenaga Cleaning Service dan Sopir	31 Orang	1.729.688.400,00	31 Orang	1.607.763.140
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	75%	4.893.867.032,70		4.086.705.323,00
Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	5 Unit	379.380.000,00	5 Unit	353.750.000
Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Peralatan Aparatur	Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Aparatur	12 Jenis	276.879.923,70	12 Jenis	247.862.000
Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah Laporan Bulanan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	12 Laporan	394.550.000,00	12 Laporan	373.648.460
Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Laporan Bulanan Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional	12 Laporan	3.825.650.000,00	12 Laporan	3.103.139.823
Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Komunikasi	Jumlah Laporan Bulanan Pemeliharaan Peralatan Komunikasi	12 Bulan	17.407.109,00	12 Bulan	8.305.040
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat Disiplin Aparatur	91,00 %	642.765.000,00		610.533.550,00
Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	112 stel	122.738.000,00	112 stel	107.646.000
Kegiatan Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan	Jumlah Pakaian Kerja Lapangan	265 stel	324.777.000,00	265 stel	315.447.550



Kegiatan Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Jumlah Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	355 stel	195.250.000,00	355 stel	187.440.000
Program Pengelolaan Data dan Informasi Perangkat Daerah	Cakupan Pengelolaan Data dan Informasi	80%	151.331.301,00		145.843.500,00
Pengembangan Database Terpadu dan Sistem Informasi Perangkat Daerah	Jumlah laporan Bulanan Pengelolaan Data dan Informasi	12 laporan	151.331.301,00	12 laporan	145.843.500
Program Pemeliharaan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat			501.000.000,00		501.000.000
Kegiatan Pengamanan Wilayah Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Presiden di Kota Bandung	Jumlah Tenaga Pengamanan Wilayah dalam Rangka Pileg dan Pilpres	1670 Orang	501.000.000,00	1670 Orang	501.000.000
Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Persentase Siskamling Tingkat RW yang Aktif	63,76 %	2.773.942.348		2.740.007.800
Kegiatan Penyiapan Tenaga Pengendali Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Jumlah Anggota Tenaga Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan (Linmas)	90 Orang	1.937.228.500,00	90 Orang	1.927.584.000
	Jumlah Patroli Perbantuan Anggota Linmas	180 Kali		180 Kali	
Kegiatan Pelatihan Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Jumlah Pelatihan dan Pembinaan dalam Rangka Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	18 Kali	508.515.000,00	18 Kali	501.600.000
	Jumlah Anggota Linmas yang Terlatih	290 Orang		290 Orang	
Kegiatan Peningkatan bina potensi masyarakat	Jumlah Siskamling RW Terbina	50 RW	328.198.848,00	50 RW	310.823.800



Program Pengembangan Kemampuan Polisi Pamong Praja dan Pengetahuan Masyarakat	Cakupan Pengembangan Kemampuan dan Pengetahuan Pol PP dan Masyarakat	73,00 %	1.967.805.805,80		1.876.599.700
Kegiatan Pembinaan dan Penyuluhan Perda Perwal kepada Masyarakat dan Badan Hukum	Jumlah Pembinaan dan Penyuluhan Perda Perwal yang Mengandung Sanksi	288 Kali	574.805.805,80	288 Kali	513.233.200
	Jumlah Laporan Bulanan Pembinaan dan Penyuluhan Perda Perwal yang Mengandung Sanksi	12 Laporan		12 Laporan	
Kerjasama Pengembangan Kemampuan Polisi Pamong Praja dengan TNI, POLRI dan Instansi Terkait	Jumlah Polisi Pamong Praja yang Terlatih	492 Orang	900.000.000,00	492 Orang	899.566.500
	Jumlah Pelatihan Polisi Pamong Praja Bekerja Sama dengan TNI, Polri, dan Instansi Terkait	7 Kali		7 Kali	
Kegiatan Penanganan Perkara Pelanggaran Perda (Sekretariat PPNS)	Jumlah Bimtek Penanganan Perkara Pelanggaran Perda	4 Kali	493.000.000,00	4 Kali	463.800.000
	Jumlah PPNS yang Mengikuti Bimtek Penanganan Perkara Pelanggaran Perda	80 Orang		80 Orang	
Progam Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Cakupan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100%	12.431.961.779,00		10.139.663.900,00



Satuan Polisi Pamong Praja

Kegiatan Kerjasama Penyelenggaraan Trantibum Tranmas dengan TNI, POLRI, dan Instansi terkait	Jumlah Operasi yang Bekerja Sama dengan TNI, Polri dan Instansi Terkait dalam Penyelenggaraan Trantibum	22 Kali	1.462.100.000,00	22 Kali	1.216.850.000
Kegiatan Pemeliharaan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Pengamanan Pemilihan Presiden dan Legislatif	15 Kali	63.980.000,00	15 Kali	30.388.000
Kegiatan Dukungan Operasi Penertiban Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Operasi Penertiban Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	365 Kali	10.905.881.779,00	365 Kali	8.892.425.900
Program Penegakan Produk Hukum daerah	Cakupan Penyelesaian Penegakan Perda	100%	2.142.900.000		1.779.201.244
Kegiatan Deteksi Dini dan Pencegahan Gangguan Tibum Tranmas	Jumlah Operasi pengamatan dan Penggambaran Intelijen Terhadap Gangguan Tibum Tranmas	24 Kali	338.000.000,00	24 Kali	256.146.421
Kegiatan Sidang Yustisi Pelanggaran Perda Perwal	Jumlah Sidang Yustisi Pelanggaran Perda dan Perwal	10 Kali	790.500.000,00	10 Kali	709.916.500
Kegiatan Penyidikan dan Penindakan Pelanggaran Produk Hukum Daerah	Jumlah Operasi Penyidikan dan Penindakan Pelanggaran Produk Hukum Daerah	100 Kali	810.400.000,00	100 Kali	663.648.323
Kegiatan Penanganan Pengaduan Masyarakat	Jumlah Laporan Bulanan Pengaduan Masyarakat yang Ditindaklanjuti	12 Laporan	204.000.000,00	12 Laporan	149.490.000



BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung Tahun 2019 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (Good Governance) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung Tahun 2019 Pembuatan LKIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

LKIP Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung Tahun 2019 ini dapat menggambarkan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Dalam tahun 2019 Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung menetapkan sebanyak 1 (satu) sasaran dengan 3 (tiga) indikator kinerja sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2019 yang ingin dicapai. Secara rinci pencapaian sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Sasaran 1 terdiri dari 3 indikator dengan nilai 100.29 %

Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian sebanyak 1 sasaran tersebut, secara umum telah melebihi target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

Dalam Tahun Anggaran 2019 untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung dalam rangka mencapai target kinerja yang ingin dicapai dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bandung Tahun Anggaran 2019 sebesar **Rp. 29.504.861.101,-** (dua



puluh Sembilan miliar lima ratus empat juta delapan ratus enam puluh satu ribu seratus satu Rupiah).

Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung 2019-2023 menetapkan sebanyak 1 (satu) sasaran dengan 3 (tiga) indikator kinerja tersebut telah dilaksanakan melalui Rencana Kinerja Tahunan tahun ke 1 dari lima tahun yang direncanakan yaitu pada tahun 2019, dengan pencapaian 1 Sasaran yang terdiri dari 3 indikator dengan nilai 100.29 %

Dalam kurun waktu 1 (satu) tahun tersebut telah menggunakan anggaran sebesar **Rp. 25.400.532.943,-** (dua puluh lima miliar empat ratus jutas lima ratus tiga puluh dua ribu Sembilan ratus empat puluh tiga Rupiah) telah mewujudkan capaian kinerja untuk menunjang pencapaian Misi dan Visi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung. Berdasarkan pagu anggaran tersebut maka realisasi anggaran yang telah digunakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung adalah 86,09 % dari anggaran yang direncanakan, hal tersebut menunjukkan bahwa perencanaan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung perlu dioptimalkan kembali agar lebih efektif dan efisien dalam meningkatkan kinerja yang mendukung pencapaian Visi dan Misi Kota Bandung.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung kepada pihak-pihak terkait baik sebagai stakeholders ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kota Bandung.

Bandung, 7 Januari 2020

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KOTA BANDUNG


RASDIAN SETIADI, S.IP
Pembina Utama Muda
NIP. 19690920 201401 1 001